



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 55 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Dinas Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Dinas Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
- BAB V : PENUTUP

(2) Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Dinas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 55**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan proses pembangunan setiap pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pemerintah Kabupaten Garut wajib menyediakan perencanaan pembangunan yang akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga pada prosesnya nanti dapat dilakukan evaluasi berkenaan dengan keluaran dan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan RPJMD Perubahan Kab. Garut tahun 2019-2020 yang kemudian di implementasikan dalam Renstra Dinas Perhubungan Perubahan Tahun 2019-2020 Dinas Perhubungan termasuk kedalam misi 3 Kabupaten Garut yaitu *Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang* dengan sasaran Meningkatkan Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Berdasarkan proses pembangunan yang telah berjalan, permasalahan pokok Dinas Perhubungan masih berkuat pada minimnya sektor sarana prasarana penunjang bidang perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan apabila diukur dari rasio kewenangan yang dimiliki seperti panjang jalan, luas wilayah pelayanan dll. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam usaha terus konsisten untuk menentukan arah kebijakan yang mendukung untuk lima tahun kedepan dengan maksud adanya peningkatan yang signifikan berkaitan dengan keberadaan sarana prasarana perhubungan serta fasilitas perlengkapan jalan.

Kondisi sebagaimana tersebut diatas mendorong Dinas Perhubungan untuk memprioritaskan pengadaan sarana dan

prasarana perlengkapan jalan dalam rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk beberapa tahun kedepan.

Pada pelaksanaannya proses penyusunan Renja 2022 telah melewati berbagai tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Adapun tahapan – tahapan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir dan
6. Penetapan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesi Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 seri E, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten garut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang urusan pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 nomor 49);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2022 dimaksudkan untuk menyediakan perencanaan yang matang dan terukur demi tercapainya sasaran kinerja akhir sesuai RPJMD Perubahan 2019-2024 dan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2019-2024. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah :

- 1) Melaksanakan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2) Sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan tahun anggaran 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana kerja Tahun Lalu

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada Anggaran dan pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan perangkat daerah beserta kebutuhan anggaran/ pagu indikatif.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Renstra 2014-2019

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Pada tahun anggaran 2020 telah diaplikasikan kedalam 10 (sepuluh) Program dan 46 kegiatan.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Program Kegiatan Tahun 2020 adalah sebesar 99,42% dengan pagu sebesar Rp. 27.178.974.672,- dari target sebesar 27.337.918.445,- dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 21.834.614.368,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.815.894.720,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- 1.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 20.171.005.768,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.170.973.170,- Sasaran kegiatan ini yaitu terpenuhinya pembayaran komunikasi sumberdaya air dan listrik, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pembayaran rekening listrik dan telepon selama 12 bulan, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik;
- 1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 22.420.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.907.900,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kondisi kendaraan dinas operasional, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah STNK kendaraan dan Uji KIR sebanyak 50 unit kendaraan, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional;

- 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor , dengan anggaran sebesar Rp. 22.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kebersihan kantor, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan kebersihan kantor 23 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan kebersihan kantor;
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.64.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.952.410,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya ATK dan materai, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis ATK dan materai sebanyak 64 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor;
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 100.584.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.164.390,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya barang cetak dan penggandaan, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis barang cetak dan penggandaan sebanyak 28 item cetak, 1 item spanduk, 1 item buku cek, 1 item penggandaan, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya barang cetak dan penggandaan;
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu terjaganya kondisi penerangan kantor, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah komponen peralatan listrik sebanyak 20 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- 1.7. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 75.256.000,- dengan realisasi sebesar Rp.74.098.700,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor sebanyak 5 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor;

- 1.8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.000.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan ASN Dinas Perhubungan, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah koran dan majalah sebanyak 7 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan wawasan Pegawai Dinas Perhubungan (Kec. Tarogong Kidul);
- 1.9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman, dengan anggaran sebesar Rp. 23.824.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.708.150,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya makan dan minum pegawai dan tamu kegiatan Dinas, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah makan minum pegawai dan tamu sebanyak 1.308 orang, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya makan minum kegiatan dinas;
- 1.10. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 14.474.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.935.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi eksternal urusan Dinas, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam satu tahun sebanyak 20 orang, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 1.11. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Teknis / Administrasi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.155.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.152.430.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kinerja pegawai Non PNS (TKK dan TKS) Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah tenaga teknis/administrasi TKK dan TKS sebanyak 48 TKK dan 252 TKS, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya penyediaan Jasa pendukung tenaga teknis / administrasi;

1.12. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Kedalam Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 150.805.000,- dengan realisasi sebesar Rp.146.725.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam satu tahun sebanyak 1.042 orang, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 264.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 263.795.108,-, yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- 2.1. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.325.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya kendaraan dinas/operasional, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional sebanyak 1 unit R4, 2 unit R2, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan kendaraan dinas operasional;
- 2.2. Kegiatan Pengadaan Meubeulair, dengan anggaran sebesar Rp.38.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.471.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya meubeulair, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah meubeulair sebanyak 4 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan akan meubeulair;
- 2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional, dengan anggaran sebesar Rp. 81.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.80.999.108,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kondisi kendaraan dinas operasional, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah suku cadang kendaraan operasional sebanyak 14 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kendaraan Dinas/Operasional.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 163.263.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 163.263.800,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

3.1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan anggaran sebesar Rp. 163.263.800,- dengan realisasi sebesar Rp.163.263.800,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya disiplin dalam berpakaian dinas, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya sebanyak 469 stel, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya bagi pegawai Dinas Perhubungan (Kec. Tarogong Kidul).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 124.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 122.971.500,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

4.1 Kegiatan Pengadaan Website, dengan anggaran sebesar Rp. 48.590.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.124.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya sistem pengadaan pelayanan secara online bidang perhubungan, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Website Dinas Perhubungan sebanyak 1 aplikasi, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Website Dinas Perhubungan;

4.2 Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Pelayanan Jasa Perhubungan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp.74.847.500,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sistem informasi pelayanan jasa perhubungan sebanyak 2 aplikasi, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem informasi pelayanan jasa perhubungan yang terintegrasi.

5) Program Peningkatan Perencanaan SKPD

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 23.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.270.000,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

3.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.23.270.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.270.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya capaian dokumen perencanaan dinas yang akuntabel, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan sebanyak 7 dokumen (RENSTRA, RENJA, PERKIN, LAPKIN, LPPD, RKT, RENCANA AKSI), Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perencanaan yang akuntabel.

6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 792.525.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 727.809.100,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

6.1 Kegiatan Pengadaan Fesibility Study (FS) Terminal Type C, dengan anggaran sebesar Rp. 96.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp.93.781.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya dokumen FS Terminal type C, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen FS terminal type C sebanyak 2 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya Fesibility Study (FS) Terminal type C Bungbulang dan Banjarwangi;

6.2 Kegiatan Penyusunan FS Gedung Uji di Garut Selatan, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.390.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah FS gedung uji Garut selatan, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen FS gedung uji Garut Selatan sebanyak 1 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya FS Gedung Uji di Garut Selatan;

6.3 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan Uji (Buku/Kartu Uji Dan Stiker Uji), dengan anggaran sebesar Rp. 348.905.000,-

dengan realisasi sebesar Rp.348.905.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu tersedianya kelengkapan uji (buku uji/kartu uji dan stiker uji), keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kelengkapan uji sebanyak 13.500 set, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kelengkapan uji (Buku/Kartu Uji dan Stiker Uji);

- 6.4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.196.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya unjuk kerja alat pengujian kendaraan bermotor, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara sebanyak 8 alat uji, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor;
- 6.5 Kegiatan Pengadaan Peralatan Keselamatan Penguji Kendaraan Bermotor, dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.49.304.500,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya persentase keselamatan penguji kendaraan bermotor, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis peralatan keselamatan penguji kendaraan bermotor sebanyak 10 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan keselamatan penguji kendaraan bermotor;
- 6.6 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Parkir Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 47.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.137.600,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya persentase pengendalian parkir umum, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah seragam lapangan petugas parkir sebanyak 41 rompi 41 jas hujan, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terkendalinya parkir umum;
- 6.7 Kegiatan Kajian Potensi Parkir di Kabupaten Garut, dengan anggaran sebesar Rp. 99.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.095.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah dokumen kajian potensi parkir, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen potensi perparkiran sebanyak 1

dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen potensi parkir di Kabupaten Garut.

7) Program Rehabilitasi Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 1.214.550.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.181.751.000,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- 7.1 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU), dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 184.584.900,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas PJU, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis pemeliharaan PJU sebanyak 281 unit, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Penerangan Jalan Umum di Wilayah Kab. Garut;
- 7.2 Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 496.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 493.720.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kab. Garut yang terbangun, Keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah PJU yang terbangun di Kec.Tarogong Kaler, Karangpawitan, Sukawening, Bayongbong, Banyuresmi, Kadungora, Leles,Wanaraja sebanyak 73 titik, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah PJU;
- 7.3 Kegiatan Meterisasi Penerangan Jalan Umum, dengan anggaran sebesar Rp. 467.970.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 454.296.100,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya efisiensi dan efektifitas PJU di wilayah Kab. Garut, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah meteran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang sebanyak 48 APP di wilayah Rayon Garut Kota,Cikajang, Leles, Cibatu dan Pameungpeuk, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya efisiensi pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
- 7.4 Kegiatan Penyusunan Data Base Penerangan Jalan Umum (PJU), dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan

realisasi sebesar Rp.49.150.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya dokumen data base PJU, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen data PJU yang terdata sebanyak 1 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya data base penerangan jalan umum (PJU).

8) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 2.013.919.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.979.390.467,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- 8.1 Kegiatan Pengadaan rambu - rambu lalu lintas, dengan anggaran sebesar Rp.206.432.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 206.432.300,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya rambu-rambu lalu lintas yang terpasang, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah rambu-rambu lalu lintas sebanyak 107 unit, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya rambu rambu lalu lintas;
- 8.2 Kegiatan Pengadaan marka jalan, dengan anggaran sebesar Rp.188.509.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 188.509.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya marka jalan di ruas jalan kabupaten, Keluaran dari kegiatan ini adalah panjang marka jalan yang terpasang 788 m² (6.56KM) di Kec.Leuwigoong,Kec.Banyuresmi,Kec.Karangtengah, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya panjang marka jalan yang terpasang;
- 8.3 Kegiatan Pengadaan Dan Pemasangan Traffic Light, dengan anggaran sebesar Rp. 378.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 371.010.749,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah Traffic Light, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebanyak 1 unit di Simpang tiga Jl.Otista, Jl.Samarang Kec.Tarogong Kaler, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Tarffic Light;
- 8.4 Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana penunjang lalu lintas, dengan anggaran sebesar Rp.279.910.000,- dengan realisasi sebesar Rp.277.574.618,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya sarana dan prasarana penunjang lalu lintas,

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah jenis sarana prasarana penunjang lalu lintas sebanyak 14 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana prasana penunjang lalu lintas;

- 8.5 Kegiatan Manajemen Lalu Lintas, dengan anggaran sebesar Rp.473.985.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 465.800.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu terlaksananya pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah lokasi pengamanan lalu lintas sebanyak 15 lokasi, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan pengamanan lalu lintas;
- 8.6 Kegiatan Study Manajemen Transportasi Perkotaan, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.985.800,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah dokumen manajemen transportasi perkotaan, Keluaran dari kegiatan ini ada jumlah dokumen pedoman transportasi perkotaan sebanyak 1 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman penataan transportasi perkotaan;
- 8.7 Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas, dengan anggaran sebesar Rp.177.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 160.151.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pengamanan angkutan hari raya, natal dan tahun baru, Keluaran dari kegiatan ini ada jumlah lokasi pengamanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru sebanyak 8 wilayah, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya keamanan dan kelancaran angkutan lebaran, natal dan tahun baru;
- 8.8 Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ, dengan anggaran sebesar Rp. 110.083.000,- dengan realisasi sebesar Rp.110.082.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya sistem informasi dan komunikasi LLAJ, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah sistem informasi sebanyak 1 aplikasi dan 1 unit CCTV, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya sistem Informasi dan komunikasi LLAJ;

8.9 Kegiatan Study Kelayakan Kawasan Tertib lalu Lintas di Kabupaten Garut, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.99.845.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya dokumen kawasan tertib lalu lintas, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen penataan transportasi perkotaan sebanyak 1 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen penataan transportasi perkotaan.

9) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 423.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 417.807.000,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

9.1. Kegiatan Pengawasan & Pengendalian Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Delman/ Andong, dengan anggaran sebesar Rp.50.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.026.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya kendaraan tidak bermotor yang terkendali, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah andong yang terkendali sebanyak 100 unit, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah terkendalinya andong yang beroperasi pada Hari Raya;

9.2. Kegiatan Evaluasi Jaringan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, dengan anggaran sebesar Rp. 98.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp.97.830.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya dokumen data base jaringan angkutan umum tidak dalam trayek, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base jaringan angkutan umum tidak dalam trayek sebanyak 1 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen data base jaringan angkutan umum tidak dalam trayek;

9.3. Kegiatan Evaluasi Jaringan Angkutan Umum Dalam Trayek, dengan anggaran sebesar Rp. 197.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp.195.691.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya dokumen data base jaringan angkutan umum dalam trayek, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen jaringan angkutan umum dalam trayek sebanyak 2 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah

tersedianya dokumen data base jaringan angkutan umum dalam trayek;

- 9.4. Kegiatan Penyusunan Data Base Angkutan Barang, dengan anggaran sebesar Rp. 77.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.260.000, Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya data base angkutan barang, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen data base angkutan barang sebanyak 2 dokumen, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen data base angkutan barang.

10) Program Peningkatan Keselamatan Perhubungan

Program ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp. 483.365.977,- dengan realisasi sebesar Rp. 483.021.977,- yang diimplementasikan ke dalam kegiatan :

- 10.1 Kegiatan Pengadaan Peringatan Keselamatan Perlintasan Kereta Api, dengan anggaran sebesar Rp. 428.480.977,- dengan realisasi sebesar Rp.428.480.977,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah palang pintu kereta api untuk keselamatan dan keamanan pengguna jalan, dengan keluaran jumlah palang pintu perlintasan kereta api di Cimaragas Karang Sari, Cikole Wanaraja, Situsari Layungsari, Karang Sari Cibolerang, Cimurah, Pasir Uncal, Bojong, Lengkong sebanyak 8 unit , Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah palang pintu perlintasan kereta api;
- 10.2 Kegiatan Kegiatan Pengawasan Operasional Kapal <7GT, dengan anggaran sebesar Rp. 26.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.075.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya pengawasan operasional kapal <7GT, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah lokasi pengawasan kapal nelayan <7GT di Kec.Pameungpeuk, Kec.Caringin sebanyak 2 Kecamatan, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengawasan kapal nelayan < 7GT;
- 10.3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Keselamatan Perhubungan Laut dan ASDP, dengan anggaran sebesar Rp. 28.810.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.466.000,- Sasaran kegiatan ini yaitu meningkatnya alat peraga keselamatan perhubungan laut dan ASDP, Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah alat

peraga keselamatan sebanyak 3 item, Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya alat peraga keselamatan;

Dari uraian sebagaimana dijelaskan diatas, tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya dipastikan mengalami kendala atau hambatan sebagai berikut :

1. Adanya pandemi *covid 19* yang menyebabkan menurunnya perekonomian dan hal ini berimbas terhadap sektor transportasi;
2. Adanya efisiensi anggaran terhadap pembangunan fisik/ bangunan dalam hal ini pembangunan terminal type C;
3. Terjadinya kerusakan prasarana alat uji kendaraan bermotor yang menyebabkan terhentinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di unit pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Garut dalam kurun waktu yang cukup lama (3 bulan);
4. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Garut untuk mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid 19.
5. Kurang sumber daya yang memiliki kompetensi pengadaan barang jasa sehingga sedikit menghambat proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa/ konstruksi.

Dalam menyasati kekurangan, hambatan serta kendala yang ada Dinas Perhubungan berupaya melakukan langkah – langkah komprehensif sebagai berikut :

- a) Melakukan efisiensi kegiatan untuk efektivitas terhadap pegawai serta memaksimalkan segala kemampuan sumber daya yang ada;
- b) Menganggarkan kembali dana untuk pengadaan sarana prasarana perhubungan yang dirasa belum optimal pada tahun anggaran berikutnya;
- c) Melakukan evaluasi secara berkala dan intensif guna mendorong percepatan pelaksanaan program kegiatan;
- d) Mendorong semua unsur pegawai Dinas Perhubungan untuk terlibat secara menyeluruh sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuannya masing-masing;
- e) Melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas dengan menggunakan skala prioritas seperti rambu, marka, pengaman

jalan dan RPPJ, sehingga diharapkan dapat mendukung kelancaran, ketertiban, keamanan serta pengawasan pergerakan lalu lintas;

- f) Tidak henti - hentinya meningkatkan pembinaan dan sosialisasi budaya tertib lalu lintas bagi pengguna baik kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi melalui kegiatan yang di danai oleh APBD dan secara perseorangan (memberikan contoh/teladan);
- g) Meningkatkan pelayanan dalam hal perijinan dengan cara penyederhanaan birokrasi dan transparansi;
- h) Penegakan Peraturan dibidang lalu lintas dan angkutan serta sanksi bagi yang merusak fasilitas lalu lintas;
- i) Melaksanakan upaya penegakkan hukum terhadap pemakai jalan baik dalam bentuk preventif maupun represif;
- j) Peningkatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat;
- k) Melakukan komputersisasi secara menyeluruh terhadap semua pelayanan perijinan di lingkungan dinas;
- l) Memprioritaskan pengadaan perlengkapan dan sarana pelayanan publik;
- m) Melayani keluhan masyarakat melalui media sosial terutama yang berkaitan dengan PJU dan perlengkapan jalan lainnya;
- n) Terus menerus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Tahun 2020

Analisis kinerja pelayanan tahun 2020 meliputi Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2020 yang merupakan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 serta implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Adapun hasil analisis yang diperoleh tergambar dalam uraian sebagaimana berikut dibawah ini :

2.2.1 Capaian kinerja RPJMD

Target dan capaian kinerja sasaran RPJMD Dinas Perhubungan Tahun 2020 merupakan kinerja penyelenggaraan

urusan pemerintah Kabupaten Garut. Adapun hasil yang dapat dicapai sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

TABEL 2.1
KINERJA SASARAN RPJMD TAHUN 2020

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja			
			Target	Realisasi/Tahun	Persentase Capaian/Tahun	Kriteria
1	2	3	4			
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	%	0,387	0,385	99,48	X
2	Rasio Ijin Trayek	%	0,128	0,128	100	√
3	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	15.018	8.771	58,40	X
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Lokasi	13	2	15,38	X
5	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	0,387	0,385	99,48	X
6	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	15	13	86,67	X
7	Pemasangan Rambu- Rambu	%	75,71	90,65	119,73	√
8	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	kend/Km	6.006,50	6.006,50	100	√
9	Jumlah Orang/ Barang yang Terangkut Angkutan Umum	Org	64.491.472	65.340.432	101,32	√
10	Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/ Terminal Per Tahun	Org/Thn	64.491.472	65.340.432	101,32	√

Dari tabel 3.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 indikator IKK yang diukur 5 indikator mencapai target dan ada yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, sementara lima indikator IKK lainnya tidak mencapai target. Apabila dibandingkan dengan capaian atau realisasi IKK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh :

6. Disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan menurunnya perekonomian dan hal ini berimbas terhadap sektor transportasi;
7. Adanya efisiensi anggaran terhadap pembangunan fisik/ bangunan dalam hal ini pembangunan terminal type C;
8. Terjadinya kerusakan prasarana alat uji kendaraan bermotor yang menyebabkan terhentinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di unit pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Garut dalam kurun waktu yang cukup lama (3 bulan);

9. Adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Garut untuk mengalihkan sebagian anggaran untuk penanganan dampak pandemi Covid 19.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terhenti. Adapun langkah – langkah yang dilakukan antara lain :

1. Mengeluarkan surat rekomendasi pengujian kendaraan bermotor wajib uji di luar wilayah Kabupaten Garut agar masyarakat pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor tetap bisa melakukan uji kendaraannya;
2. Menginventarisir kembali sarana prasarana yang tidak bisa di sediakan pada tahun anggaran 2020 agar bisa kembali di ajukan pada tahun anggaran selanjutnya;
3. Mengoptimalkan seluruh jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan capaian IKK Dinas Perhubungan agar pada pelaksanaan tahun selanjutnya realisasi dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.2.2 Ringkasan Kinerja Pencapaian Sasaran Renstra Dinas Perhubungan

Tahun 2020 merupakan tahun awal implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja perubahan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tahun 2020 diperoleh data – data sebagaimana tersaji dalam tabel berikut dibawah ini :

TABEL 2.2
KINERJA PENCAPAIAN RENSTRA 2019-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	HASIL TAHUN 2019	HASIL TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN 2020 THD TARGET (%)	TERCAPAI / TIDAK **)	HASIL SAMPAI DENGAN 2020	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (%)	24,47	29,59	29,59	100%	√	29,59	76,17
2	Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (%)	31,64	32,50	32,50	100%	√	32,50	74,35
3	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi (%)	25	27,92	27,92	100%	√	27,92	59,40
4	Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan (%)	24,29	49,32	49,32	100%	√	49,32	87,08

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Ket : √ = mencapai target, X = tidak mencapai target, Δ = tidak mencapai target tetapi ada peningkatan.

2.2.3 Rincian Kinerja

Capaian kinerja pada tahun anggaran 2020 yang diukur berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Dinas Perhubungan Tahun 2020 meliputi 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator. Dari 4 (empat) indikator tersebut semuanya mencapai target sesuai dengan yang telah direncanakan.

Berikut uraian rincian kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2020, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Aksesabilitas Dan Mobilitas Transportasi Menuju Pusat – Pusat Perekonomian Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan.

Sasaran diatas memiliki 2 (dua) indikator dengan deskripsi penjelasan capaian sebagai berikut :

1. Capaian indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan adalah 29,59% dari target sebesar 29,59% atau dengan peresentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan

karena : *adanya pola pengawasan yang cukup ketat kepada kuasa pengguna anggaran agar dalam pelaksanaan program kegiatan lebih memprioritaskan kebutuhan yang berkaitan dengan pengadaan sarana prasarana perhubungan, sehingga arah kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana.*

2. Indikator Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan capaian kinerja sebesar 32,50% dari target 32,50% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *kebutuhan masyarakat terhadap perlengkapan jalan terutama Penerangan Jalan Umum (PJU) sangat tinggi sehingga dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin agar pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dapat terpenuhi. Selain itu pengadaan fasilitas perlengkapan jalan merupakan program prioritas dalam melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan.*

2) Meningkatnya Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas

Sasaran dua sebagaimana diatas memiliki 2 (dua) indikator dengan rincian dan capaian sebagai berikut :

1. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi target 27,92% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *ketersediaan angkutan umum tidak mengalami perubahan signifikan, sehingga upaya dinas perhubungan dalam meningkatkan ketersediaan angkutan umum yang beroperasi tidak mengalami kendala yang cukup berarti.*
2. Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan target 49,32% dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena : *adanya kebijakan dan inisiatif dari jajaran pimpinan dinas Perhubungan untuk mengalihkan kegiatan yang sedianya berfokus terhadap pengumpulan masa menjadi kegiatan yang bersifat penyediaan barang yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, sehingga secara tidak langsung tidak mengurangi substansi program keselamatan perhubungan.*

2.3 Isu Strategis

Sementara itu isu strategis Dinas Perhubungan berkenaan dengan penyusunan program kegiatan tahun 2022 adalah :

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi;
- b. Belum optimalnya pengelolaan sistem angkutan umum yang terpadu dan berkelanjutan;
- c. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan IPTEK dalam penyelenggaraan Transportasi;
- d. Masih rendahnya pemahaman dan pengelolaan keselamatan lalu lintas.

Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan isu strategis maka diperoleh rumusan untuk rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah dengan memprioritaskan pengadaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan pelayanan angkutan dan keselamatan perhubungan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dengan dengan dokumen perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membandingkannya dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Garut tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan program kegiatan yang di ajukan dalam Rancangan Awal RKPD dengan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja Dinas Perhubungan antara pagu Indikatif rancangan awal RKPD dengan kebutuhan dana yang diperlukan untuk rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 telah sesuai.

Proses menyandingkan antara renja dengan RKPD penting dilakukan secara sistematis dan menyeluruh agar ada keselarasan antara program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan program kerja yang dilaksanakan oleh tingkat SKPD.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100%	46.612.022.871	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100%	46.612.022.871	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Dokumen	50.000.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Dokumen	50.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 Dokumen	25.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	Jumlah laporan evaluasi kinerja dinas	12 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut	Jumlah laporan evaluasi kinerja dinas	12 Laporan	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	462 Orang	17.287.045.871	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah ASN yang menerima gaji, tunjangan, jasa tenaga perhubungan dan tenaga administrasi	462 Orang	17.287.045.871	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah PNS Dinas Perhubungan	162 Orang	15.337.545.871	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut	Jumlah PNS Dinas Perhubungan	162 Orang	15.337.545.871	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut	Jumlah Pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	300 Orang	1.949.500.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Garut	Jumlah Pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	300 Orang	1.949.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	4 Item	755.895.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum perkantoran	4 Item	755.895.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	Jumlah Pakaian Dinas	469 Stel	317.895.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garut	Jumlah Pakaian Dinas	469 Stel	317.895.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garut	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	10 Orang	250.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	76 Orang	138.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	76 Orang	138.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	56 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garut	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	56 Orang	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum kepegawaian	40 Item	775.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum kepegawaian	40 Item	775.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jenis komponen listrik	20 Item	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garut	Jumlah Jenis komponen listrik	20 Item	20.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Item	200.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garut	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Item	200.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan	35 Item	150.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan	35 Item	150.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut	Jumlah koran dan majalah	413 Eksempl	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Garut	Jumlah koran dan majalah	413 Eksempl	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah makan minum pegawai dan tamu	2360 Orang	90.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut	Jumlah makan minum pegawai dan tamu	2360 Orang	90.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1320 Orang	305.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1320 Orang	305.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang disediakan	3 Item	5.025.082.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah barang milik daerah yang disediakan	3 Item	5.025.082.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah kendaraan dinas operasional	3 Unit	2.037.882.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah kendaraan dinas operasional	3 Unit	2.037.882.000	
	Pengadaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah mebel	7 Item	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah mebel	7 Item	100.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Gedung kantor Dinas dan gedung uji	2 Unit	2.807.200.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Gedung kantor Dinas dan gedung uji	2 Unit	2.807.200.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Posko terpadu	8 Unit	80.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah Posko terpadu	8 Unit	80.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kebersihan dan pembayaran rekening listrik	12 Bulan	22.424.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa kebersihan dan pembayaran rekening listrik	12 Bulan	22.424.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah pembayaran rekening listrik kantor dan PJU	12 Bulan	22.400.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garut	Jumlah pembayaran rekening listrik kantor dan PJU	12 Bulan	22.400.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah peralatan kebersihan	23 Item	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garut	Jumlah peralatan kebersihan	23 Item	24.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana aparatur	64 Unit	295.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sarana dan prasarana aparatur	64 Unit	295.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan Dinas Operasional	64 Unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garut	Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan Dinas Operasional	64 Unit	130.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah mebel kantor dinas yang terpelihara	7 Item	15.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Garut	Jumlah mebel kantor dinas yang terpelihara	7 Item	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah gedung yang direhab/ dipelihara	3 Lokasi	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Garut	Jumlah gedung yang direhab/ dipelihara	3 Lokasi	150.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	80,88%	20.246.055.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	81%	20.246.055.000	
			Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	77,13%				Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	77%	-	
			Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13%				Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77%	-	
			Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	68,58%				Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	69%	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	66,01%				Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	66%	-	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	800 titik	9.525.355.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah PJU yang terbangun dan terpelihara	800 titik	9.525.355.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah PJU yang dibangun	566 titik	5.760.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah PJU yang dibangun	566 titik	5.760.000.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut	Dokumen data base PJU Jumlah meteran listrik PJU Jumlah PJU yang terpelihara	1 Dokumen 150 APP 700 Titik	3.765.355.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Garut	Dokumen data base PJU Jumlah meteran listrik PJU Jumlah PJU yang terpelihara	1 Dokumen 150 APP 700 Titik	3.765.355.000	
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah dokumen pengelolaan terminal penumpang type C	1 dokumen	6.580.000.000	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah dokumen pengelolaan terminal penumpang type C	1 dokumen	6.580.000.000	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Garut	DED terminal type C Cibatu	1 dokumen	80.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kab. Garut	DED terminal type C Cibatu	1 dokumen	80.000.000	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Garut	Gedung Terminal type C Limbangan	1 Unit	3.500.000.000	Pembangunan Gedung Terminal	Kab. Garut	Gedung Terminal type C Limbangan	1 Unit	3.500.000.000	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut	Luas Lahan Terminal type C	5000 Meter	3.000.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kab. Garut	Luas Lahan Terminal type C	5000 Meter	3.000.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Wilayah Kab. Garut	Jumlah Lokasi pengawasan penyelenggaraan parkir umum	2 wilayah	200.000.000	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir		Jumlah Lokasi pengawasan penyelenggaraan parkir umum	2 wilayah	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Dokumen Data base potensi Perparkiran Jumlah Lokasi Parkir yang diawasi	1 Dokumen 2 Wilayah	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Dokumen Data base potensi Perparkiran Jumlah Lokasi Parkir yang diawasi	1 Dokumen 2 Wilayah	200.000.000	
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	11739 set	875.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	11739 set	875.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Peralatan Keselamatan PKB	1 Unit 14 item	250.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Peralatan Keselamatan PKB	1 Unit 14 item	250.000.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Jumlah kelengkapan uji (buku/ kartu uji dan stiker uji)	11739 Set	375.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Jumlah kelengkapan uji (buku/ kartu uji dan stiker uji)	11739 Set	375.000.000	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Garut	Jumlah Lokasi pengawasan penyelenggaraan parkir umum	2 wilayah	50.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kab. Garut	Jumlah Lokasi pengawasan penyelenggaraan parkir umum	2 wilayah	50.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	2 wilayah	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Garut	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	2 wilayah	200.000.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	97 unit	2.518.000.000	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	97 unit	2.518.000.000	
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah PAMSUS Perhubungan Jumlah wilayah pengamanan angkutan hari raya natal dan tahun baru	15 Lokasi 34 Orang 8 Wilayah	936.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah PAMSUS Perhubungan Jumlah wilayah pengamanan angkutan hari raya natal dan tahun baru	15 Lokasi 34 Orang 8 Wilayah	936.000.000	
	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut	APILL Jumlah rambu rambu lalu lintas Panjang Marka Jalan Rambu papan nama jalan	1 Unit 97 Unit 3762 Meter 109 Unit	1.127.000.000	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kab. Garut	APILL Jumlah rambu rambu lalu lintas Panjang Marka Jalan Rambu papan nama jalan	1 Unit 97 Unit 3762 Meter 109 Unit	1.127.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas	11 Unit	255.000.000	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas	11 Unit	255.000.000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Dokumen Manajemen Transportasi Perkotaan	1 Dokumen	100.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Dokumen Manajemen Transportasi Perkotaan	1 Dokumen	100.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah pelaksanaan forum LLAJ	4 Kali	100.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah pelaksanaan forum LLAJ	4 Kali	100.000.000	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Dokumen audit dan inspeksi keselamatan jalan	1 dokumen	151.700.000	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Dokumen audit dan inspeksi keselamatan jalan	1 dokumen	151.700.000	
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Garut	Dokumen Audit Keselamatan Jalan	1 Dokumen	51.700.000	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Kab. Garut	Dokumen Audit Keselamatan Jalan	1 Dokumen	51.700.000	
	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah frekuensi SMK Jumlah peserta pelajar pelopor keselamatan	2 Kali 50 Orang	100.000.000	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah frekuensi SMK Jumlah peserta pelajar pelopor keselamatan	2 Kali 50 Orang	100.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah prasaran angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	2 unit	316.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah prasaran angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang	2 unit	316.000.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Database angkutan barang Jumlah Peserta temu wicara pengelola angkutan umum Jumlah Shelter/ Halte angkutan umum Jumlah Sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum	1 Dokumen 30 Orang 2 Lokasi 30 Orang	316.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Database angkutan barang Jumlah Peserta temu wicara pengelola angkutan umum Jumlah Shelter/ Halte angkutan umum Jumlah Sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum	1 Dokumen 30 Orang 2 Lokasi 30 Orang	316.000.000	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan tidak dalam trayek yang terkendali	206 unit	120.000.000	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah angkutan tidak dalam trayek yang terkendali	206 unit	120.000.000	
	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Andong dan Becak yang terkendali	206 Unit	120.000.000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Andong dan Becak yang terkendali	206 Unit	120.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek angkutan umum	2 Dokumen	160.000.000	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen rencana umum jaringan trayek angkutan umum	2 Dokumen	160.000.000	
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen database angkutan umum dan Evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek	2 Dokumen	160.000.000	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah Dokumen database angkutan umum dan Evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek	2 Dokumen	160.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase sarana pelayaran yang laik layar	88,89%	150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase sarana pelayaran yang laik layar	89%	150.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	700 unit	150.000.000	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan pengawasan keselamatan angkutan laut	700 unit	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah kpal layar 7GT yang laik layar Jumlah Lokasi operasional kapal <7GT Jumlah peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	700 Unit 5 Lokasi 15 Item	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah kpal layar 7GT yang laik layar Jumlah Lokasi operasional kapal <7GT Jumlah peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	700 Unit 5 Lokasi 15 Item	150.000.000	
				Jumlah	67.008.077.871				Jumlah	67.008.077.871	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan musrenbang SKPD ada beberapa kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Kegiatan yang diusulkan tersebut yang mana merupakan bagian dari tufoksi serta wewenang Dinas Perhubungan selaku SKPD yang menerima usulan.

Menanggapi usulan tersebut, dinas perhubungan melakukan penyaringan dan memvalidasi usulan agar program kegiatan yang di usulkan sesuai dengan sasaran serta tufoksi Dinas Perhubungan.

Adapun program kegiatan yang diusulkan melalui kegiatan musrenbang tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut dibawah ini.

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Garut

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/ Kota <i>Penyediaan Perlengkapan di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	Desa Bojong Kidul, Kab. Garut, Pameungpeuk, Bojong Kidul	Jumlah PJU yang terbangun	10 titik	
		Kp.Cihikeu RW.03, Kab. Garut, Bungbulang, Cihikeu		10 titik	
		Dusun Bangbayang, Kab. Garut, Cibalong, Mekarsari		61 titik	
		JLN Dewi Roro Kidul Desa Mancagahar, Kab. Garut, Pameungpeuk, Mancagahar		15 titik	
		DESA PAMALAYAN KEC CISEWU KAB GARUT, Kab. Garut, Cisewu, Pamalayan		5 titik	
		Dari Pasir Muncang - Sawahtegal, Kab. Garut, Pakenjeng, Panyindangan		10 titik	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		Kp. Sindangsari RW.001 Dusun Sindangsari, Kab. Garut, Cisompet, Sindangsari		5 titik	
		Desa Purbayani, Kab. Garut, Caringin, Purbayani		20 titik	
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>	Jalan Desa Dunguswiru Nomor 01 Kp. Batununggul RW.06, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Dunguswiru		15 titik	
		Desa pameungpeuk, Kab. Garut, Pameungpeuk, Pameungpeuk		30 titik	
		RW.01 RW.02 RW.03 RW.04 RW.05 RW.06, Kab. Garut, Bungbulang, Gunamekar		20 titik	
		KP. Lengkong RW.008 Dusun Lengkong, Kab. Garut, Cisompet, Sindangsari		5 titik	
		Kp.Tegal Buleud Rt 02 Rw 02, Kab. Garut, Mekarmukti, Cijayana		10 titik	
		Kp.Cidolog RT 06 RW 01, Kab. Garut, Singajaya, Pancasura		10 titik	
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	<i>Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</i>	Kp. Cijambe Jalan Provinsi Limbangan, Kab. Garut, Bl. Limbangan, Limbangan Tengah	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	1 Lokasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sudah sering disampaikan bahwa terbitnya undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengurangi sebagian kewenangan yang dimiliki oleh dinas Perhubungan Kabupaten Garut terutama dengan keberadaan terminal.

Selain itu berkaitan dengan reaktivasi jalur kereta api di wilayah Kabupaten Garut sampai dengan saat ini kewenangan sepenuhnya berada di Kementerian Perhubungan dalam hal ini pemerintah pusat.

Hal tersebut diatas sangat jelas berimbas terhadap tatanan urusan perhubungan ditingkat pemerintah daerah. Salah satu hal yang paling krusial adalah berkurangnya potensi PAD dari sektor perhubungan.

Berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, mneyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dalam hal ini RPJP nasional, RPJM nasional, renja pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten disusun secara paralel atau ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Keselarasan antara RPJMN, RPJM provinsi dan RPJMD Kabupaten Garut harus menjadi landasan serta referensi bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja tahunan SKPD.

Untuk Tahun anggaran 2022 Dinas Perhungan dalam konteks urusan perhubungan tidak masuk dalam program prioritas pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan tahun kedua implementasi atas tujuan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan

Kabupaten Garut tahun 2019-2024 yaitu : “Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas;

Sedangkan sasaran Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah :

- 1) Meningkatkan Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan;
- 2) Meningkatkan pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan dan sarana pelayaran.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
					2022
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas		Tingkat ketersediaan sarana prasarana perhubungan, fasilitas perlengkapan jalan, angkutan umum yang beroperasi, penyuluhan keselamatan lalulintas dan angkutan dan laik layar sarana pelayaran	%	78,17
		Meningkatnya Aksesibilitas Dan Mobilitas Transportasi Dengan Ketersediaan Sarana Prasarana Perhubungan Dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	80,88
			Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan	%	74,32
		Meningkatnya pelayanan angkutan umum, sosialisasi keselamatan perhubungan	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang beroperasi	%	66,01

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Satuan	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN
					2022
		dan sarana pelayaran	Tingkat penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan	%	68,58
			Tingkat laik layar sarana pelayaran	%	88,89

3.2.1 Program dan Kegiatan

Dalam RPJMD Perubahan Kab. Garut tahun 2019-2024 dinas perhubungan termasuk kedalam misi 3 yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang dengan sasaran Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat- pusat perekonomian.

Apabila dikaitkan dengan aspek pelayanan umum urusan perhubungan (IKK urusan perhubungan) penyediaan sarana prasarana merupakan faktor yang berpengaruh terhadap capaian kinerja IKK urusan perhubungan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, Dinas perhubungan dalam menetapkan program kegiatannya berusaha untuk menyelaraskannya dengan RPJMD Perubahan serta Renstra Perubahan dimana fokus pembangunan berada pada penyediaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai, karena di beberapa wilayah kerja Dinas Perhubungan masih banyak fasilitas serta sarana prasarana yang belum memadai bahkan ada beberapa wilayah yang masih kurang sarana prasarana penunjang operasionalnya.

Faktor utama yang dijadikan landasan dalam penyusunan program/ kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah salah satunya sebagai upaya dalam mendukung kebijakan

pemerintah daerah Kabupaten Garut yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah.

Fokus pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Meningkatkan Penyediaan Infrastuktur Dasar (Perhubungan) Dan Pelayanan Perhubungan Yang Merata Dan Berkualitas.

Adapun program yang akan dilaksanakan meliputi tiga program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Indikator Program :

- 1) Persentase ketersediaan sarana prasarana perhubungan;
 - 2) Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas;
 - 3) Persentase ketersediaan penerangan jalan umum (PJU);
 - 4) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum;
 - 5) persentase sosialisasi keselamatan perhubungan.
3. Program Pegelolaan Pelayaran;

Indikator Program :

- 1) Persentase sarana pelayaran yang laik layar.

Berdasarkan pagu validasi Renja 2022 yang telah di *input* ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara keseluruhan anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 67.208.077.871,- yang keseluruhannya bersumber dari APBD Kabupaten Garut T.A 2022.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja

Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa rencana kerja Dinas Perhubungan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan serta peningkatan pelayanan angkutan umum berikut sosialisasi keselamatan perhubungan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sektor Transportasi saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat seiring dengan berkembangnya pusat – pusat perekonomian di Kabupaten Garut akan tetapi belum diimbangi dengan keberadaan sarana prasarana dan fasilitas perlengkapan jalan yang memadai. Selain itu hal tersebut juga merupakan bagian dari penyelarasan dengan dokumen – dokumen perencanaan di tingkat yang lebih tinggi.

Rencana kerja Dinas Perhubungan disusun berpedoman pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kedua atas implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan tersebut diatas mengisaratkan bahwa seluruh program kegiatan/ sub kegiatan di input ke aplikasi berbasis elektronik yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri yang prosesnya melewati beberapa tahapan yaitu :

1. Persiapan
2. Rancangan Awal
3. Rancangan
4. Musrenbang
5. Rancangan Akhir

6. Penetapan.

Dari segi pendanaan anggaran program kegiatan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2022 berasal dari APBD Kabupaten Garut.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								67.208.077.871				65.160.684.500		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								67.208.077.871				65.160.684.500		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						100 %		46.612.022.871				50.610.484.500		
2	15	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7 Dokumen		50.000.000				55.000.000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah Dokumen Perencanaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Kab. Garut			7 Dokumen		25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	27.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah laporan evaluasi kinerja dinas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelaporan Dinas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	12 Laporan	7 Dokumen	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	27.500.000
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						462 Orang		17.287.045.871					16.929.500.000
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah PNS Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kinerja ASN Dinas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	162 Orang		15.337.545.871	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	14.980.000.000
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah Pegawai Non PNS (TKK dan TKS)	Meningkatnya Kinerja ASN Dinas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	300 Orang	462 Orang	1.949.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	1.949.500.000
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4 Item		755.895.000					831.484.500

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Pakaian Dinas	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut	100 %	469 Stel		317.895.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	349.684.500
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut	100 %	10 Orang	4 Item	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	275.000.000
2	15	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut	100 %	76 Orang	4 Item	138.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	151.800.000
2	15	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran	Kab. Garut	100 %	56 Orang	4 Item	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	55.000.000
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						40 Item		775.000.000				1.061.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Jenis komponen listrik	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	20 Item		20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	22.000.000
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	6 Item	40 Item	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	430.100.000
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah jenis Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	35 Item	40 Item	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	165.000.000
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah koran dan majalah	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	413 Eksempl	ar40 Item	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	10.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah makan minum pegawai dan tamu	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	2360 Orang	40 Item	90.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	99.000.000	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Meningkatnya penyediaan administrasi umum kepegawaian	Kab. Garut	100 %	1320 Orang	40 Item	305.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	335.500.000	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3 Item		5.025.082.000				8.382.000.000	
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah kendaraan dinas operasional	Meningkatnya Asset pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola DINas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	3 Unit		2.037.882.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	2.519.000.000	
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	Jumlah mebel	Meningkatnya Asset pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola DINas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	7 Item	3 Item	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan - Dishub	100 %	275.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Gedung kantor Dinas dan gedung uji	Meningkatnya Asset pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola DIInas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	2 Unit	3 Item	2.807.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	5.500.000.000	
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah Posko terpadu	Meningkatnya Asset pemerintah Kabupaten Garut yang dikelola DIInas Perhubungan	Kab. Garut	100 %	8 Unit	3 Item	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	88.000.000	
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12 Bulan					23.026.400.000		
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah pembayaran rekening listrik kantor dan PJU	Meningkatnya kebersihan dan nyaman kantor	Kab. Garut	100 %	12 Bulan		22.400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	23.000.000.000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah peralatan kebersihan	Meningkatnya kebersihan dan nyaman kantor	Kab. Garut	100 %	23 Item	12 Bulan	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	26.400.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64 Unit		295.000.000				324.500.000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah pembayaran pajak STNK kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Garut	100 %	64 Unit		130.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	143.000.000
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah mebel kantor dinas yang terpelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Garut	100 %	7 Item	64 Unit	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	16.500.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	Jumlah gedung yang direhab/ dipelihara	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Garut	100 %	3 Lokasi	64 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan – Dishub	100 %	165.000.000
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)								20.446.055.000				14.165.200.000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota								9.525.355.000				6.090.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah PJU yang terbangun	Meningkatnya PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut	7713,00 %	566 Titik	800 titik	5.760.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	4.000.000.000
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Dokumen data base PJU Jumlah meteran listrik PJU Jumlah PJU yang terpelihara	Meningkatnya PJU yang terbangun dan terpelihara	Kab. Garut	7713,00 %	1 Dokumen 150 APP 700 Titik	800 titik	3.765.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	2.090.000.000
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C													3.770.000.000
2	15	02	2.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	DED terminal type C Cibatu	Meningkatnya pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut	8088,00 %	1 dokumen	1 Dokumen	80.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	85.000.000
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Gedung Terminal type C Limbangan	Meningkatnya pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut	8088,00 %	1 Unit	1 Dokumen	3.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	385.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Luas Lahan Terminal type C	Meningkatnya pengelolaan terminal penumpang type C	Kab. Garut	8088,00 %	5000 Meter	1 Dokumen	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	3.300.000.000
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Dokumen Data base potensi Perparkiran Jumlah Lokasi Parkir yang diawasi	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan parkir umum	Kab. Garut Kab. Garut	8088,00 %	1 Dokumen 2 Wilayah	2 Wilayah	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	220.000.000
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor													925.000.000
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Peralatan Keselamatan PKB	Meningkatnya peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	Kab. Garut	8088,00 %	1 Unit 14 item	11739 set	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	275.000.000
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Jumlah kelengkapan uji (buku/ kartu uji dan stiker uji)	Meningkatnya peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	Kab. Garut	8088,00 %	11739 Set	11739 set	375.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	375.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.05	06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Jumlah wilayah potensi kendaraan wajib uji	Meningkatnya peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	Kab. Garut	8088,00 %	8 Wilayah	11739 set	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	55.000.000
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	Meningkatnya peralatan pendukung pengujian kendaraan bermotor	Kab. Garut	8088,00 %	8 Unit	11739 set	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas Perhubungan	80,88 %	220.000.000
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							2.518.000.000					2.554.600.000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah lokasi pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya Jumlah PAMSUS Perhubungan Jumlah wilayah pengamanan angkutan hari raya natal dan tahun baru	Meningkatnya prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut	7713,00 %	15 Lokasi 34 Orang 8 Wilayah	97 Unit	936.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	936.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	APILL Jumlah rambu rambu lalu lintas Panjang Marka Jalan Rambu papan nama jalan	Meningkatnya prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Kab. Garut Kab. Garut	7713,00 %	1 Unit 97 Unit 3762 Meter 109 Unit	97 Unit	1.127.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	1.130.850.000	
2	15	02	2.06	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah sarana dan prasarana penunjang lalu lintas	Meningkatnya prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut	7713,00 %	11 Unit	97 Unit	255.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	267.750.000	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Dokumen Manajemen Transportasi Perkotaan	Meningkatnya prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Kab. Garut	7713,00 %	1 Dokumen	97 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	110.000.000	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Jumlah pelaksanaan forum LLAJ	Meningkatnya prasarana fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Kab. Garut	7713,00 %	4 Kali	97 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ketersediaan fasilitas pengendalian dan pengaturan lalu lintas	77,13 %	110.000.000	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan								151.700.000			170.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.08	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	Dokumen Audit Keselamatan Jalan	Meningkatnya audit inspeksi keselamatan jalan	Kab. Garut	6858,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	51.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	68,58 %	60.000.000	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	Jumlah frekuensi SMK Jumlah peserta pelajar pelopor keselamatan	Meningkatnya audit inspeksi keselamatan jalan	Kab. Garut	6858,00 %	2 Kali 50 Orang	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sosialisasi keselamatan perhubungan	68,58 %	110.000.000	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							316.000.000				347.600.000		
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Database angkutan barang Jumlah Peserta temu wicara pengelola angkutan umum Jumlah Shelter/ Halte angkutan umum Jumlah Sopir/ juru mudi/	Meningkatnya prasarana angkutan umum	Kab. Garut	6601,00 %	1 Dokumen 30 Orang 2 Lokasi 30 Orang	2 Unit	316.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	66,01 %	347.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						awak kendaraan angkutan umum												
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							120.000.000				132.000.000		
2	15	02	2.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Andong dan Becak yang terkendali	Meningkatnya angkutan tidak dalam trayek yang terkendali	Kab. Garut Kab. Garut	6601,00 %	206 Unit	206 Unit	120.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	66,01 %	132.000.000	
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								160.000.000			176.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	Jumlah Dokumen database angkutan umum dan Evaluasi jaringan angkutan umum dalam trayek	meningkatnya rencana umum jaringan trayek angkutan umum	Kab. Garut	6601,00 %	2 Dokumen	2 Dokumen	160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	66,01 %	176.000.000	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN								150.000.000				165.000.000	
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota								150.000.000				165.000.000	
2	15	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase sarana pelayaran yang laik layar	Jumlah kpal layar 7GT yang laik layar Jumlah Lokasi operasional kapal <7GT Jumlah peralatan keselamatan perhubungan laut dan ASDP	Meningkatnya pengawasan keselamatan angkutan laut	Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut Kab. Garut	8889,00 %	700 Unit 5 Lokasi 15 Item	700 Unit	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase sarana pelayaran yang laik layar	88,89 %	165.000.000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2022 merupakan implementasi program kegiatan tahun awal dari pelaksanaan Renstra Perubahan Dinas Perhubungan 2019-2024 serta RPJMD Perubahan Kab. Garut 2019-2024.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut ini disusun melalui tahapan serta proses yang terukur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik dalam proses penyusunannya maupun dalam proses memasukan data di Aplikasi SIPD sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022.

Sebagai bahan tindak lanjut untuk perencanaan tahun berikutnya jajaran Dinas Perhubungan akan berusaha untuk selalu mengevaluasi seluruh program kegiatan yang telah direncanakan agar tepat sasaran.

Akhirnya semoga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Garut.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN